

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Jambi  
 Nama OPD : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAMBI  
 Tahun Penilaian : 2023  
 Periode yang dinilai : RPJMD 2021 - 2026  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang

SEBELUM EVALUASI																
No	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	RESIKO			SEBAB		U/C	DAMPAK		Skala Dampak	Nilai Kemungkinan	Tingkat Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	No		
		URAIAN	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	SUMBER		Uraian	Pihak yg terkena							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA															
	I Kegiatan															
	1 Pengembangan Kompetensi Teknis															
	1.1. Sub Kegiatan															
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1	ROO.22.38.99.01	Bidang PKTI & PKTUF	1. Belum adanya database ASN se-Provinsi Jambi terkait sertifikasi dan pengembangan kompetensi 2. Belum adanya pemetaan/perencanaan kebutuhan sertifikasi dan pengembangan kompetensi 3. Belum adanya database kompetensi tenaga pengajar dan spesialisasi asesor kompetensi pemerintahan	internal	C	Pembinaan standarisasi, sertifikasi dan pengembangan kompetensi belum mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi	Seluruh ASN	2	3	11	1. Berkoordinasi dengan pihak terkait (LAN-RI, K/L, Pemda) terkait pelaksanaan pengembangan kompetensi 2. Menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk mengembangkan metode pengembangan kompetensi yang kekinian sesuai era disrupsi. 3. Melaksanakan rapat pengendalian/evaluasi secara berkala 4. Komitmen pimpinan dalam melaksanakan kegiatan melalui penandatanganan PK dan PI 5. Arahan kepala BPSDM secara berkala terkait pelaksanaan kegiatan secara langsung maupun melalui media sosial (whatsapp, instagram, dll) 6. Menyampaikan Laporan secara berkala ke pimpinan			
	Pelaksanaan sertifikasi dan pengembangan kompetensi tidak memberikan manfaat bagi stakeholder	2	ROO.22.38.99.02	Bidang PKTI & PKTUF	1. Belum adanya standarisasi pembelajaran mulai dari modul pembelajaran, kompetensi tenaga pengajar hingga sarana dan prasarana	internal	C	Pembinaan sertifikasi dan pengembangan kompetensi belum mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi	seluruh stakeholder	2	3	11	1. Berkoordinasi dengan pihak terkait (LAN-RI, K/L, Pemda) terkait pelaksanaan pengembangan kompetensi			

No	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	RESIKO			SEBAB		U/C	DAMPAK		Skala Dampak	Nilai Kemungkinan	Tingkat Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	No	16	17
		URAIAN	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	SUMBER		Uraian	Pihak yg terkena							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					2. Belum adanya mekanisme monitoring dan evaluasi pasca sertifikasi dan pengembangan kompetensi								2. Menjaln kerjasama dengan pihak terkait untuk mengembangkan metode pengembangan kompetensi yang kekinian sesuai era disrupsi.			
													3. Melaksanakan rapat pengendalian/evaluasi secara berkala			
													4. Komitmen pimpinan dalam melaksanakan kegiatan melalui penandatanganan PK dan PI			
													5. Arahan kepala BPSDM secara berkala terkait pelaksanaan kegiatan secara langsung maupun melalui media sosial (whatsapp, instagram, dll)			
													6. Menyampaikan Laporan secara berkala ke pimpinan			
		3	ROO.22.38.99.03	Bidang PKTI & PKTUF	1. Terdapat benturan kepentingan dalam penentuan peserta	internal	C	1. Peserta diklat tidak sesuai dengan target awal yang dipersyaratkan	BPSDM	2	3	11	1. SOP sudah ada			
					2. Banyak kabupaten tidak menganggarkan kegiatan diklat			2. Banyak peserta diklat yang berasal dari "teman" panitia/penyelenggara diklat					2. Penentuan peserta sudah dilakukan oleh pembina jabatan fungsional			
					3. Kurangnya komunikasi penyelenggara diklat dalam menjelaskan mekanisme pendaftaran diklat			3. Kualitas dan kuantitas peserta diklat tidak sesuai target					3. Pemanfaatan TIK melalui SIKILAT dalam penentuan peserta			
					4. Belum adanya SOP terkait pendaftaran diklat											
					5. Adanya komunikasi informal panitia ke calon peserta terkait penetapan peserta											
II	Kegiatan															
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan															
	1.1. Sub Kegiatan															
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	1	ROO.22.38.99.04	Bidang SKPK	1. Terbatasnya anggaran sertifikasi bagi ASN lingkup Kemendagri dan Penda	internal	C	Pembinaan sertifikasi belum mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi	BPSDM	2	3	11	1. Melaksanakan rapat pengendalian/evaluasi secara berkala			



No	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			RESIKO			SEBAB		U/C	DAMPAK		Skala Dampak	Nilai Kemungkinan	Tingkat Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	No		
				URAIAN	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	SUMBER		Uraian	Pihak yg terkena							
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.4	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia)		1 Pelaksanaan sertifikasi dan pengembangan kompetensi belumsesuai dengan kebutuhan ASN	ROO.22.38.99.07	Bidang PKTI & PKTUF	1. Belum adanya database ASN se-Provinsi Jambi terkait sertifikasi dan pengembangan kompetensi internal		C	Pembinaan standarisasi, sertifikasi dan pengembangan kompetensi belum mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi	Seluruh ASN	2	3	11	1. Berkoordinasi dengan pihak terkait (LAN-RI, K/L, Pemda) terkait pelaksanaan pengembangan kompetensi			
							2. Belum adanya pemetaan/perencanaan kebutuhan sertifikasi dan pengembangan kompetensi internal								2. Menjalni kerjasama dengan pihak terkait untuk mengembangkan metode pengembangan kompetensi yang kekinian sesuai era disrupsi.			
							3. Belum adanya database kompetensi tenaga pengajar dan spesialisasi asesor kompetensi pemerintahan internal								3. Melaksanakan rapat pengendalian/evaluasi secara berkala			
															4. Komitmen pimpinan dalam melaksanakan kegiatan melalui penandatanganan PK dan PI			
															5. Arahan kepala BPSDM secara berkala terkait pelaksanaan kegiatan secara langsung maupun melalui media sosial (whatsapp, instagram, dll)			
															6. Menyampaikan Laporan secara berkala ke pimpinan			
				2 Pelaksanaan sertifikasi dan pengembangan kompetensi tidak memberikan manfaat bagi stakeholder	ROO.22.38.99.08	Bidang PKTI & PKTUF	1. Belum adanya standarisasi pembelajaran mulai dari modul pembelajaran, kompetensi tenaga pengajar hingga sarana dan prasarana internal		C	Pembinaan sertifikasi dan pengembangan kompetensi belum mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi	seluruh stakeholder	2	3	11	1. Berkoordinasi dengan pihak terkait (LAN-RI, K/L, Pemda) terkait pelaksanaan pengembangan kompetensi			
							2. Belum adanya mekanisme monitoring dan evaluasi pasca sertifikasi dan pengembangan kompetensi								2. Menjalni kerjasama dengan pihak terkait untuk mengembangkan metode pengembangan kompetensi yang kekinian sesuai era disrupsi.			
															3. Melaksanakan rapat pengendalian/evaluasi secara berkala			
															4. Komitmen pimpinan dalam melaksanakan kegiatan melalui penandatanganan PK dan PI			

No	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan			RESIKO			SEBAB		U/C	DAMPAK		Skala Dampak	Nilai Kemungkinan	Tingkat Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	No	16	17
				URAIAN	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	SUMBER		Uraian	Pihak yg terkena							
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															5. Arahan kepala BPSDM secara berkala terkait pelaksanaan kegiatan secara langsung maupun melalui media sosial (whatsapp, instagram, dll)			
															6. Menyampaikan Laporan secara berkala ke pimpinan			
			3	Penetapan peserta diklat berjalan tidak optimal (adanya peserta yang mengundurkan diri setelah ditetapkan)	ROO.22.38.99.09	Bidang PKTI & PKTUF	1. Terdapat benturan kepentingan dalam penentuan peserta	internal	C	1. Peserta diklat tidak sesuai dengan target awal yang dipersyaratkan	BPSDM	2	3	11	1. SOP sudah ada			
							2. Banyak daerah tidak menganggarkan kegiatan diklat			2. Banyak peserta diklat yang berasal dari "teman" panitia/penyelenggara diklat					2. Penentuan peserta sudah dilakukan oleh pembina jabatan fungsional			
							3. Kurangnya komunikasi penyelenggara diklat dalam menjelaskan mekanisme pendaftaran diklat			3. Kualitas dan kuantitas peserta diklat tidak sesuai target					3. Pemanfaatan TIK melalui SIKLAT dalam penentuan peserta			
							4. Belum adanya SOP terkait pendaftaran diklat											
							Adanya komunikasi informal panitia ke calon peserta terkait penetapan peserta											
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>																	
	<b>I Kegiatan</b>																	
	<b>1 RUTIN</b>																	
		1.1.	1	Potensi Terdapat sarana dan prasarana yang tidak dapat dimanfaatkan.	ROO.22.38.99.10	SEKRETARIAT	1. Pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai kebutuhan	internal	C	Terhambatnya pelaksanaan sertifikasi dan pengembangan kompetensi.	BPSDM	3	3	13	1. Melakukan pengendalian terhadap proses pemeliharaan sarana dan prasarana (rapat internal, rapat dengan pihak ke-3)			
							2. Pemeliharaan sarana dan prasarana tidak optimal								2. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memaksimalkan pemeliharaan sarana dan prasarana (bagian Umum, dll)			
															3. Melakukan pelatihan/ pengembangan kompetensi terhadap pegawai/pengelola sarana dan prasarana			

No	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	RESIKO			SEBAB		U/C	DAMPAK		Skala Dampak	Nilai Kemungkinan	Tingkat Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	No		
		URAIAN	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	SUMBER		Uraian	Pihak yg terkena							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2	Potensi Pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai ketentuan.	ROO.22.38.99.11	SEKRETARIAT	1. Kurangnya integritas petugas yang bertanggungjawab atas pengadaan.  internal	C	1. Terdapatnya Kerugian Negara	BPSDM	3	3	13	1. Melakukan pengendalian terhadap proses pemeliharaan sarana dan prasarana (rapatinternal, rapat dengan pihak ke-3)			
						Adanya perbedaan dalam penentuan standar		2. Terhambatnya pelaksanaan sertifikasi dan pengembangan kompetensi.					2. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memaksimalkan pemeliharaan sarana dan prasarana (Bagian Umum, dll)			
													3. Melakukan pelatihan/ pengembangan kompetensi terhadap pegawai/pengelola sarana dan prasarana			
		3	Pengelolaan Aset tidak sesuai ketentuan	ROO.22.38.99.12	SEKRETARIAT	1. Pengelolaan Aset tidak sesuai ketentuan  internal	C	1. Terdapatnya Kerugian Negara	BPSDM	3	3	13	1. Melakukan pengendalian terhadap proses pemeliharaan sarana dan prasarana (rapatinternal, rapat dengan pihak ke-3)			
						2. Kurangnya kompetensi pegawai dalam melakukan pengelolaan aset		2. Terhambatnya pelaksanaan sertifikasi dan pengembangan kompetensi.					2. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memaksimalkan pemeliharaan sarana dan prasarana (Bagian Umum, dll)			
						3. Terdapat kekeliruan dalam proses inputing data aset							3. Melakukan pelatihan/ pengembangan kompetensi terhadap pegawai/pengelola sarana dan prasarana			
						4. Belum adanya SOP terkait pengelolaan aset										
						5. Belum adanya mekanisme monitoring dan evaluasi aset										

Ket :

1. Kolom 1 berisi no urut
2. Kolom 2 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
3. Kolom 3 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut
4. Kolom 4 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
5. Kolom 5 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
6. Kolom 6 berisi nilai kemungkinan apabila risiko tersebut terjadi
7. Kolom 7 berisi nilai Dampak terjadinya risiko tersebut
8. Kolom 8 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7
9. Kolom 9 Diisi Pengendalian yang sudah ada
10. Kolom 10 Diisi Efektivitas Pengendalian yang ada
11. Kolom 11 Diisi Pengendalian yang masih dibutuhkan























